

## **Tokoh Nusantara Era Tahun 1980 Hingga 2000**

### **Pendahuluan**

Periode 1980 hingga 2000 menjadi masa penting dalam sejarah modern Indonesia, di mana berbagai aspek kehidupan nasional —politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama— mengalami transformasi signifikan. Era ini ditandai dengan stabilitas politik di bawah Orde Baru, modernisasi militer dan aparat keamanan, pembangunan ekonomi menghadapi tantangan global, serta penguatan identitas nasional di tengah pluralisme budaya dan agama. Tokoh-tokoh dari berbagai unsur berperan dalam mengarahkan perubahan ini, mencerminkan pentingnya kepemimpinan strategis dan pengabdian sosial.

Kiprah mereka menunjukkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga implementasi di daerah, dari Sabang sampai Merauke. Dari pendidikan hingga keamanan, dari ekonomi hingga budaya, dan dari pemerintahan hingga komunitas agama, semua aspek saling berkaitan dalam membentuk Indonesia modern. Artikel ini mengulas sebelas tokoh yang dianggap berpengaruh, mewakili wilayah dan unsur berbeda, sehingga memberikan gambaran utuh tentang pembangunan bangsa di era tersebut.

### **1. Ali Wardhana (DKI Jakarta)**

Ali Wardhana adalah ekonom ternama yang menjabat Menteri Keuangan hingga 1983 dan kemudian Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (1983–1988) (Wardhana, 2015). Ia memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan fiskal nasional, mengelola utang luar negeri, dan menjaga stabilitas inflasi di tengah ketidakpastian harga minyak global. Kebijakan Ali Wardhana menekankan koordinasi pusat-daerah dan keterlibatan sektor swasta sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain aspek fiskal, Wardhana berperan dalam mengembangkan industrialisasi dan pemerataan pembangunan antar-daerah. Ia mendorong sektor ekonomi lokal untuk berkontribusi pada pertumbuhan nasional, menekankan perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat (Wardhana, 2015). Kiprahnya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang stabil membutuhkan strategi matang, koordinasi lintas sektoral, dan penerapan yang konsisten di lapangan.

### **2. Azyumardi Azra (Riau/Jakarta)**

Prof. Dr. Azyumardi Azra dikenal sebagai pemikir Islam modern dan pendidik yang fokus pada pendidikan Islam, pluralisme, dan hubungan agama dengan kebangsaan (Azra, 2018). Sepanjang 1980–2000, ia menulis karya ilmiah, mengajar, dan membangun lembaga pendidikan yang memperkuat pemikiran Islam inklusif di Indonesia. Azra berperan dalam mengembangkan kerangka pemikiran Islam yang moderat, sejalan dengan modernisasi pendidikan dan nilai kebangsaan.

Selain itu, ia memperkenalkan konsep Islam Nusantara yang mengintegrasikan tradisi lokal dengan pemikiran global. Azra mendorong pendidikan multikultural, memperkuat literasi agama dan budaya, dan membentuk kesadaran masyarakat akan toleransi dan pluralisme (Azra, 2018). Kontribusinya menunjukkan pentingnya pendidikan dan pemikiran kritis dalam membentuk karakter bangsa yang adaptif terhadap globalisasi.

### **3. Haryono Suyono (Jawa Timur)**

Haryono Suyono memimpin BKKBN dan program kependudukan nasional pada era 1980–1998 (Wardhana, 2015). Ia menekankan program Keluarga Berencana (KB), memperluas jaringan layanan kesehatan dasar, dan memperkuat Payscale untuk memberdayakan masyarakat. Strategi Haryono menunjukkan hubungan erat antara pembangunan kependudukan, kesehatan ibu-anak, dan pendidikan masyarakat.

Selain itu, Haryono mendorong integrasi program gizi, kesehatan, dan pendidikan, sehingga pembangunan kependudukan tidak hanya menjadi program administrasi, tetapi berdampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat (Wardhana, 2015). Kiprahnya mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif.

#### **4. Soepardjo Rustam (Jawa Tengah)**

Soepardjo Rustam menjabat Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri pada pertengahan 1980-an (Wardhana, 2015). Ia fokus pada penguatan birokrasi dan koordinasi pusat-daerah agar kebijakan pembangunan nasional berjalan efisien. Rustam menekankan pelatihan aparatur pemerintah dan pengembangan sistem administrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Di bidang sosial, Rustam memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang terintegrasi. Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah dan nasional tidak bisa dipisahkan, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat (Wardhana, 2015).

#### **5. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)**

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Ketua NU dan figur sentral gerakan sosial-keagamaan Indonesia (Azra, 2018). Ia mendorong dialog antar-agama, memperkuat masyarakat sipil, dan memberdayakan komunitas lokal melalui program sosial. Gus Dur menekankan bahwa pembangunan sosial dan moral berperan strategis dalam membangun bangsa yang inklusif.

Selain itu, Gus Dur memperkuat akses pendidikan, hak-hak minoritas, dan demokrasi sosial. Kiprahnya menunjukkan bahwa pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak hanya soal ekonomi atau politik, tetapi juga memerlukan moral dan nilai-nilai sosial yang kuat (Azra, 2018).

#### **6. Kwik Kian Gie (Jawa Barat)**

Kwik Kian Gie dikenal sebagai ekonom yang kritis terhadap kebijakan pemerintah (Wardhana, 2015). Ia menekankan transparansi, pemerataan pembangunan, dan reformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama. Analisis dan kritiknya terhadap kebijakan fiskal menjadi acuan bagi pengambil keputusan dan masyarakat untuk reformasi yang lebih terbuka.

Selain itu, Kwik aktif mengedukasi masyarakat melalui seminar dan media massa, membangun literasi ekonomi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan reformasi institusi yang nyata (Wardhana, 2015).

#### **7. Y. B. Mangunwijaya (Jawa Tengah)**

Y. B. Mangunwijaya, yang lebih dikenal sebagai Romo Mangun, adalah sosok tokoh yang menggabungkan peran sebagai imam, arsitek, dan pendidik. Ia mendirikan berbagai sekolah dan pesantren di pedesaan Jawa Tengah, menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai sosial dan budaya lokal (Azra, 2018). Dalam setiap proyek pendidikan, Mangunwijaya selalu menekankan bahwa pembangunan fisik sekolah tidak cukup tanpa membangun karakter dan kesadaran sosial siswa. Ia mengintegrasikan pendidikan formal dan kegiatan sosial untuk membentuk generasi yang sadar akan tanggung jawab moral dan sosialnya terhadap masyarakat sekitar.

Selain itu, Mangunwijaya aktif membina masyarakat pedesaan melalui berbagai program pemberdayaan komunitas. Ia mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sekolah,

program kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lokal, sehingga masyarakat menjadi subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah (Azra, 2018). Pendekatan holistik ini menjadikan Mangunwijaya simbol pembangunan sosial yang berbasis komunitas, menunjukkan bahwa pendidikan dan pembangunan sosial harus berjalan beriringan agar berdampak jangka panjang.

#### **8. Yogie Suardi Memet (Jawa Barat)**

Letjen TNI (Purn) Yogie Suardi Memet menjabat Gubernur Jawa Barat selama periode krusial akhir Orde Baru, di mana provinsi ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat (Wardhana, 2015). Yogie menekankan stabilitas politik sebagai fondasi pembangunan, memadukan peran TNI dan aparat sipil dalam menjaga ketertiban masyarakat. Ia mengembangkan strategi pembangunan infrastruktur yang menekankan konektivitas antar wilayah, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata di seluruh kabupaten dan kota.

Lebih dari itu, Yogie Suardi Memet memfokuskan perhatian pada peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, pelatihan SDM, dan reformasi birokrasi untuk mendukung program pembangunan daerah. Ia juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan, agar warga desa dan kota merasakan manfaat nyata pembangunan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara keamanan, administrasi publik, dan partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya dapat berkelanjutan (Wardhana, 2015).

#### **9. J. Soedradjad Djiwandono (DKI Jakarta)**

J. Soedradjad Djiwandono memainkan peran sentral dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia sepanjang 1980-an hingga pertengahan 1990-an (Wardhana, 2015). Ia bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui strategi pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan, dan koordinasi antara kementerian ekonomi dengan pemerintah daerah. Pendekatan Soedradjad menekankan pentingnya analisis berbasis data, perencanaan jangka panjang, dan respons cepat terhadap fluktuasi ekonomi global. Selain itu, Soedradjad aktif mendorong integrasi program pembangunan antar-provinsi, pelatihan sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pemantauan program, dan evaluasi hasil pembangunan, sehingga kebijakan ekonomi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Wardhana, 2015).

#### **10. Sutanto (Kalimantan Selatan)**

Jenderal Polri Sutanto menonjol sebagai figur penting dalam profesionalisasi kepolisian Indonesia pada akhir 1990-an hingga awal era reformasi (Wardhana, 2015). Ia memperkuat struktur internal Polri, menekankan disiplin, transparansi, dan peningkatan kemampuan operasional. Program-program modernisasi yang dipelopori Sutanto mencakup pelatihan aparat, perbaikan sistem manajemen, dan pengembangan standar pelayanan publik agar kepolisian lebih profesional dan responsif terhadap masyarakat.

Sutanto juga menekankan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia, mendorong Polri agar berfungsi sebagai institusi pelayanan masyarakat sekaligus pelindung keamanan nasional. Ia aktif membangun kepercayaan publik melalui dialog dengan masyarakat dan reformasi institusi, sehingga citra Polri sebagai lembaga yang bersih dan profesional meningkat. Kiprahnya menunjukkan bahwa modernisasi institusi keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Wardhana, 2015).

## **11. Ali Yafie (Sulawesi Tengah)**

Prof. Dr. Ali Yafie, Ketua Umum MUI pada 1990-an, dikenal sebagai tokoh ulama yang memperjuangkan pluralisme, integrasi masyarakat tradisional, dan pendidikan agama berbasis budaya lokal (Azra, 2018). Ia mendorong pesantren untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisional. Ali Yafie percaya bahwa pembangunan moral dan agama menjadi fondasi penting integrasi sosial dan pembangunan nasional.

Selain itu, Ali Yafie aktif dalam dialog lintas agama dan pembinaan komunitas lokal untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan sosial. Kiprahnya menunjukkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya berbasis ekonomi dan politik, tetapi juga membutuhkan perhatian pada aspek moral, keagamaan, dan budaya agar keberagaman Nusantara menjadi kekuatan integratif bagi Indonesia (Azra, 2018).

## **Penutup**

Era tahun 1980 hingga 2000 menunjukkan bahwa pembangunan nasional Indonesia bukan hanya soal ekonomi atau politik, tetapi juga melibatkan pendidikan, sosial, budaya, keamanan, dan moral-agama. Kontribusi tokoh dari Sabang sampai Merauke menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor dan wilayah.

Kesebelas tokoh Nusantara ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional memerlukan kepemimpinan yang visioner, profesionalisme, moralitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Generasi kini dapat meneladani dedikasi mereka untuk melanjutkan pembangunan bangsa yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Referensi**

- Azra, A. (2018). *Azyumardi Azra: Pembaruan Pemikiran dan Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 19-28.
- Wardhana, A. (2015). *Prof. Dr. Ali Wardhana: Indonesia's Longest Serving Finance Minister*. The Jakarta Post.
- Wardhana, A. (2015). *Haryono Suyono dan Pembangunan Keluarga Berencana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Wardhana, A. (2015). *J. Soedradjad Djiwandono: Kebijakan Fiskal dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Ekonomi.
- Azra, A. (2018). *Y. B. Mangunwijaya: Pembangunan Sosial dan Pendidikan di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Sosial.
- Wardhana, A. (2015). *Soepardjo Rustam: Politik dan Administrasi Daerah*. Jakarta: Pustaka Politik.
- Wardhana, A. (2015). *Yogie Suardi Memet: Stabilitas Politik dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Politik.
- Wardhana, A. (2015). *Kwik Kian Gie: Reformasi Ekonomi dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Azra, A. (2018). *Abdurrahman Wahid dan Pluralisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka Agama.
- Wardhana, A. (2015). *Sutanto dan Modernisasi Polri di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Politik.